

Graduate Employability pada Lulusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2015

M.R. Khairul Muluk ^{a*}, M. Chazienul Ulum ^a dan Nurjati Widodo ^a

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 29 Agustus 2016

Revisi pertama tanggal: 20 Oktober 2016

Diterima tanggal: 03 November 2016

Tersedia *online* tanggal: 16 November 2016

Keywords: *graduate employability, learning outcomes (LO), needs of working world, competency of graduate*

ABSTRACT

The Graduates of Public Administration Study Program is still a gap between the competency of graduates with the actual needs of the workplace. To anticipate and overcome it, it is necessary to do a comprehensive study that involves three elements, namely LO, competencies desired by the work field, and the real conditions of the current graduates. Under ideal conditions, competencies desired by the world of work—which of course is constantly changing throughout the ages—LO must be met by Prodi and by the graduates themselves. Although LO set has been declared in accordance with KKNI, there is still no definitive analysis results and accountability that LO has been in accordance with the actual needs of the working world. Research on Graduate Employability is conducted at the Public Administration of FIA UB that focusing on the achievement of LO associated with skill ability quality of graduates and the needs of the working world.

INTISARI

Lulusan Prodi Administrasi Publik dinilai masih terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan yang sebenarnya dari dunia kerja. Untuk mengantisipasi sekaligus mengatasinya, perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif yang melibatkan tiga unsur, yakni LO program studi, kompetensi yang diinginkan oleh dunia kerja, dan kondisi nyata lulusan saat ini. Dalam kondisi ideal, kompetensi yang diinginkan oleh dunia kerja—yang tentunya terus berubah sepanjang jaman—haruslah dapat dipenuhi oleh LO prodi dan oleh lulusan itu sendiri. Meskipun LO yang ditetapkan telah dinyatakan sesuai dengan KKNI, masih belum ada hasil analisis yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa LO tersebut telah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dunia kerja. Penelitian tentang Graduate Employability ini dilakukan pada Prodi Administrasi Publik FIA UB yang memfokuskan pada pencapaian LO dikaitkan dengan kualitas kemampuan skill lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

2016 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Peran perguruan tinggi adalah mencetak lulusan yang layak berkontribusi pada masyarakat, dan salah satunya adalah berkontribusi di dunia kerja. Banyaknya

stakeholder pada sistem pemberi kerja telah melahirkan variasi kelayakan kerja yang dibutuhkan atau yang disebut sebagai *graduate employability* (kelayakan kerja lulusan). Kinash et al. (2015) mendefinisikan *graduate*

* Corresponding author. Tel.: +62-853-3491-6305; e-mail: mochamad.ulum@gmail.com

employability sebagai seperangkat prestasi, pemahaman dan atribut pribadi yang membuat individu lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan berhasil dalam pekerjaan yang mereka pilih. *Employability* adalah suatu susunan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bekerja (Oxford University, t.t.).

Dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan nyata kepada proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang melibatkan dosen dan mahasiswa pada semua program studi, termasuk Program Studi (Prodi) Strata-1 Administrasi Publik. Dalam hal ini mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik mempunyai peran yang sangat penting karena sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses dan memanfaatkan dengan optimal segala fasilitas pendidikan yang disediakan oleh FIA UB.

Salah satu upaya untuk pengembangan kompetensi lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama antara dosen dan mahasiswa di berbagai kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, misalnya, dosen di kelas selalu berupaya untuk mendorong partisipasi keaktifan belajar mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak semata mengandalkan materi yang disampaikan oleh dosen tetapi juga aktif mencari di luar kelas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dengan demikian, mahasiswa akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, berkemampuan memecahkan masalah, dan memiliki semangat pembelajaran sepanjang masa. Selain itu, belasan laboratorium pendidikan yang berdiri di FIA UB pun dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan keilmuannya di luar ruang perkuliahan. Misalnya, Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan yang menjadi pusat pembelajaran sistem pemerintahan dan tempat diskusi antara dosen, mahasiswa, serta para pakar di bidang pemerintahan.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang non-akademik. Tercatat ada 17 organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, dan puluhan unit kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, yang dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa, salah satu organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas nya adalah kegiatan Sanggar Seni Mahasiswa. Dalam organisasi ini, mahasiswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya di bidang kesenian, seperti alat musik tradisional (gamelan) dan ragam tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Tak

jarang organisasi ini menggelar pementasan bersama antara dosen dan mahasiswa untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman di bidang kesenian.

Dengan adanya berbagai kegiatan pengembangan akademik dan non-akademik yang ada, diharapkan lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB menjadi sarjana-sarjana yang siap kerja dalam artian mampu menerapkan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama belajar di FIA UB untuk membantu organisasi, baik negeri maupun swasta, meraih tujuan-tujuannya. Ditambah lagi dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Tahun 2015 berpotensi untuk menjadi tantangan bagi Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB untuk meningkatkan kompetensi lulusannya. Dengan kemudahan arus keluar-masuk sumber daya manusia di antara negara-negara ASEAN melalui MEA, lulusan universitas dalam negeri, salah satunya Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB, harus berhadapan dengan lulusan atau sumber daya manusia dari negara-negara di kawasan ASEAN.

Pada kenyataannya, dalam hal kompetensi yang dimiliki oleh lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB, diketahui masih terdapat perbedaan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan yang sebenarnya dari dunia kerja. Selain itu, beberapa lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB yang secara akademik memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terbilang tinggi belum sepenuhnya terserap di dunia kerja secara optimal, sehingga masa tunggu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan relatif lama. Contoh-contoh kasus ini adalah indikasi masalah yang harus segera diatasi bila lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB tidak ingin kalah bersaing dengan lulusan atau sumber daya manusia dari negara-negara ASEAN.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif yang melibatkan tiga komponen, yakni *Learning Outcomes* (LO) yang merupakan capaian hasil pembelajaran yang diharapkan dari Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB, kompetensi (pengetahuan dan keterampilan kerja) yang dibutuhkan oleh pemberi kerja (pemberi kerja), dan kondisi kompetensi riil lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB saat ini. Dalam kondisi ideal, kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja—yang tentunya terus berubah sepanjang jaman—hendaknya dapat dipenuhi oleh LO prodi dan oleh lulusan itu sendiri. Meskipun LO yang ditetapkan oleh Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB telah dinyatakan sesuai dengan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang disusun bersama-sama antara dunia kerja dengan asosiasi pengelola prodi, pada kenyataannya masih belum ada hasil analisa yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa LO tersebut telah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dunia kerja. Dengan

demikian, apabila masih terdapat keraguan dalam LO yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maka perlu ditelaah apakah kompetensi lulusan yang dihasilkan dari LO tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

Oleh karena itu, untuk menjawab seluruh permasalahan sebagaimana tersebut di atas, tim peneliti melakukan sebuah penelitian dengan topik *Graduate Employability* (Kelayakan Kerja Lulusan) pada Lulusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Teori

2.1 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Hal ini senada dengan pendapat World Bank (1994:15), bahwa Pendidikan tinggi memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia dalam banyak cara. Investasi dalam pendidikan tinggi dapat menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab utama untuk melatih tenaga profesional suatu negara, termasuk manajer, ilmuwan, insinyur, dan teknisi yang berpartisipasi dalam pengembangan, adaptasi, dan difusi inovasi dalam perekonomian.

Tugas utama negara didalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan, khususnya mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa program sarjana (S1) mempunyai tujuan menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Perguruan Tinggi Negeri diselenggarakan berbasis Tri Dharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

2.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kualifikasi yang dimaksud adalah penguasaan

capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Dengan demikian jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/ atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Sementara upaya penyetaraan di sini dimaksudkan sebagai proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.

KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi tersebut terdiri dari:

- Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
- Jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan
- Jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum, selain terdapat deskripsi khusus yang berlaku untuk setiap jenjang sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Penjenjangan kualifikasi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau pendidikan informal untuk: (a) menempuh pendidikan formal ke jenjang/tingkat yang lebih tinggi; dan/atau (b) mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari perguruan tinggi. Selain itu, setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

2.3 *Graduate Employability*

Salah satu peran yang ada dalam perguruan tinggi adalah mencetak lulusan yang layak pada berkontribusi pada masyarakat, salah satunya adalah berkontribusi di dunia kerja. Banyaknya *stakeholder* pada sistem pemberi kerja telah melahirkan variasi kelayakan kerja yang dibutuhkan. Kinash et al. (2015) menyatakan bahwa setiap *stakeholder* memiliki kebutuhan dan ekspektasi, tension dan misalignments dengan stakeholder yang lain.

Employability dalam Bahasa Indonesia secara umum diterjemahkan sebagai kelayakan kerja. Kelayakan kerja bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan (Kulkarni dan Chachadi, 2014). Namun seperti yang dijelaskan juga oleh Knight dan Yorke dalam Kinash dkk (2014) mendefinisikan *graduate employability* sebagai seperangkat prestasi, pemahaman dan atribut pribadi yang membuat individu lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan

berhasil dalam pekerjaan yang mereka pilih. *Employability* adalah suatu susunan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bekerja (Oxford University, t.t.).

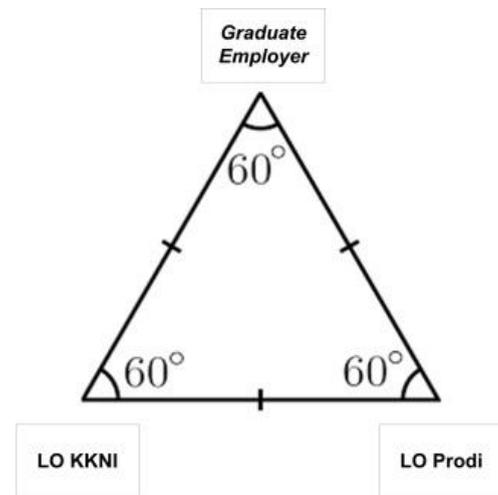
Dari pengertian diatas maka dapat dilakukan sintesa bahwa *Employability* dan *Graduate Employability* mempunyai pengertian yang sama serta tidak hanya tentang mendapatkan kerja namun juga penetapan jati diri seseorang untuk berkontribusi dalam suatu bidang dan ditunjukkan dengan kemampuan yang mereka miliki, dalam penelitian kami akan menggunakan istilah *Graduate Employability*. Karena secara filosofis *employability* merupakan kemampuan seseorang yang dapat berpikir secara rasional dan memiliki kemampuan praktis, mengandung nilai tambah, solusi dari ilmu pengetahuan, yang mencari posisi sesuai dalam organisasi (Kulkarni dan Chachadi, 2014).

Penelitian *Employability Skill* hingga dewasa ini sangat marak dilakukan di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Beberapa penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Cleary (2007) yang meneliti *Employability Skill* di Australia dengan menggunakan delapan pengidentifikasi skill/keterampilan, yakni:

- a) Keterampilan komunikasi yang berkontribusi terhadap hubungan yang produktif dan harmonis antara karyawan dan pelanggan;
- b) Keterampilan kerja sama tim yang berkontribusi terhadap hubungan kerja dan hasil yang produktif;
- c) Keterampilan pemecahan masalah yang berkontribusi terhadap hasil yang produktif;
- d) Keterampilan manajemen diri yang berkontribusi terhadap kepuasan dan pertumbuhan karyawan;
- e) Keterampilan perencanaan dan pengorganisasian yang berkontribusi terhadap perencanaan strategis jangka panjang dan jangka pendek;
- f) Keterampilan teknologi yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas yang efektif;
- g) *Life-long learning skills* yang berkontribusi terhadap peningkatan dan ekspansi berkelanjutan pada operasi dan hasil kerja karyawan dan perusahaan; dan
- h) *Initiative and enterprise skills* yang berkontribusi terhadap hasil kerja yang inovatif.

Dalam penelitian ini kami menggunakan kerangka penelitian berupa *Tripple Impact Model* untuk memudahkan memahami dalam penelitian ini. Kami menggambarkan peran ketiga istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu: KKNi, Prodi Administrasi Publik serta *Graduate Employer*. Mengapa kami menggunakan segitiga sama sisi dalam bidang geometri segitiga sama sisi dijelaskan juga sebagai *equilateral triangle* yang artinya adalah memiliki sisi dan sudut yang sama sebesar 60 derajat untuk setiap sisinya. Artinya adalah ketiga poin ini memiliki peran yang sama-sama pentingnya dari sisi sudut dan panjangnya. Jika ada sisi

atau sudut yang tidak sama panjang maka segitiga sama sisi ini tidak dapat terwujud. Sehingga ketiga poin ini harus berjalan sinergi dan harmoni untuk mewujudkan *triple impact*.



Gambar 1 Tripple Impact Model
Sumber: Data Diolah (2015)

2.4 Learning Outcome Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB

Dalam penyusunan kurikulum Prodi Administrasi Publik FIA UB tanggal 20-21 Desember 2013, telah disepakati penggunaan 10 kompetensi KKNi yang telah ditetapkan oleh *Indonesian Association For Public Administration* (IAPA) untuk dijadikan standar kompetensi/*Learning Outcome* (LO) Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB, yakni:

- a) Menguasai konsep dan teori tentang mendesain dan mengelola organisasi sektor publik, mengimplementasi kebijakan publik, mengelola pelayanan dan partisipasi publik;
- b) Mampu memformulasikan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen sektor publik;
- c) Mampu merumuskan dan mengkomunikasikan alternatif solusi yang berada di luar kewenangannya kepada pimpinannya;
- d) Menguasai metode dan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk administrasi publik;
- e) Menguasai konsep dan teori etika dan integritas administrasi publik;
- f) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam: mendesain dan mengelola organisasi sektor publik, mengimplementasi kebijakan publik, mengelola pelayanan dan partisipasi publik;
- g) Mampu menyelesaikan masalah dengan mengambil diskresi sesuai dengan kewenangannya;
- h) Mampu menyusun telaahan staf dalam proses pembuatan keputusan;
- i) Mampu melaksanakan tupoksi secara efektif dan efisien dengan menggunakan informasi dan kemampuan analisis yang dimilikinya; dan

- j) Mampu mengelola sektor publik untuk mewujudkan nilai-nilai publik: efisiensi, efektivitas, berkeadilan, dan demokrasi baik secara individual maupun tim.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam, khususnya terkait dengan kriteria lulusan yang diharapkan, evaluasi terhadap hubungan antara tiga hal (*learning outcomes*/KKNI, kondisi/ profil riil lulusan/alumni, dan pihak pemberi kerja).

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis deskriptif, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap objek penelitian, dalam hal ini adalah profil lulusan Administrasi Publik FIA UB, pihak pemberi kerja, dan muatan dalam KKNI yang diberlakukan.

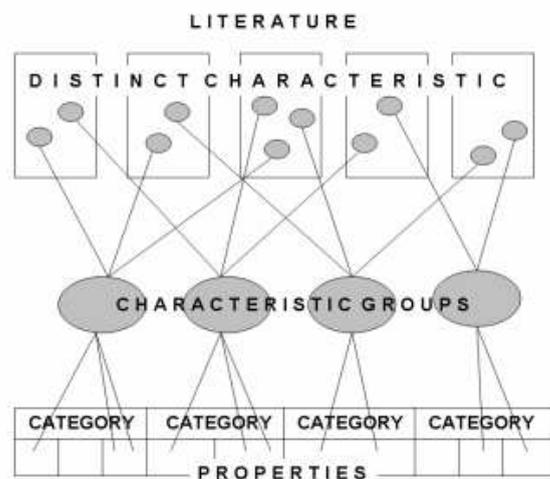
Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai status fenomena variabel atau kondisi situasi. Karenanya, penelitian ini didesain untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan dan persepsi perekrut lulusan dengan memantau pendapat pemberi kerja di berbagai area publik dan bisnis. Selain mengidentifikasi latar belakang lulusan pendidikan tinggi saat direkrut, penelitian ini berupaya menjustifikasi pentingnya berbagai keterampilan dan kemampuan (*skills*) yang diperlukan oleh lulusan. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui Kuesioner (*Questionnaire*), Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), Pengamatan (*Observation*), dan Dokumentasi (*Documentation*).

Penelitian ini mengambil 4 (empat) wilayah di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian. Kedua wilayah tersebut adalah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kota Malang. Alasan pemilihan keempat wilayah tersebut, yakni kota-kota tersebut memiliki beragam jenis lapangan kerja, baik instansi pemerintah maupun perusahaan. Situs penelitian di Kota Surabaya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, PT. Pelabuhan Indonesia III. Situs Penelitian di Kota Kediri adalah PT. Gudang Garam Tbk. Situs Penelitian di Kabupaten Kediri adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri. Sedangkan situs penelitian di Kota Malang adalah *Malang Corruption Watch* (MCW), AIA Financial Cabang Malang, dan kediaman seorang entrepreneur yang bernama Purwono Tjokrodarsono. Dengan beberapa situs penelitian tersebut, diharapkan mampu mewakili keberagaman jenis pemberi kerja lulusan Prodi S1 Administrasi Publik FIA UB.

Berkenaan dengan penelitian deskriptif yang dilakukan secara komparatif ini, maka model analisis data kualitatif yang paling sesuai adalah metode

perbandingan tetap (*constant comparative method*) yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss dalam Hannah (2005:6). Secara umum, proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Hipotesis kerja yang dimaksud di sini tidak lain merupakan panduan untuk membuat verifikasi atau kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moleong (2009:289), bahwa hipotesis kerja tersebut harus menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memahami lebih jelas komponen analisis data model perbandingan tetap dari Glaser dan Strauss dalam Hannah (2005:6) tersaji dalam skema pada Gambar 2.



Gambar 2 Analisis data model *Constant Comparative Method* dari Glaser & Strauss
Sumber: Hannah (2005)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Kesesuaian *Learning Outcomes* (LO) Program Studi Administrasi Publik FIA UB dengan Kompetensi yang dibutuhkan Pemberi Kerja

Kesesuaian LO S1 Administrasi Publik FIA UB dengan kebutuhan institusi di Balitbang ada beberapa yang sesuai seperti masalah manajemen pengembangan sumber daya manusia tapi ada beberapa hal yang tergantung dari individu masing-masing untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, di instansi ini membutuhkan para lulusan yang bisa kompeten di bidang analisis kebijakan dan konsep-konsep kebijakan ilmu administrasi yang terbaru atau yang berkembang saat ini. Pada intinya 10 muatan *learning outcomes* masih dibutuhkan untuk menunjang kompetensi mahasiswa.

Di lingkungan kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur kondisi ini sudah sesuai, pada intinya semua LO yang sudah ada tidak perlu ada yang dikurangi karena semua sudah terkait dengan

kondisi yang ada dilapangan kerja, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan seperti poin mampu memformulasikan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen sektor publik, menguasai metode dan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk administrasi publik, mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendesain dan mengelola organisasi sektor publik, mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola pelayanan dan partisipasi publik dan mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien dengan menggunakan informasi dan kemampuan analisis yang dimilikinya.

Di BKD profil lulusan yang dibutuhkan di pemerintahan adalah mampu dan mau belajar semua hal baru, mempunyai kepercayaan diri, mampu menempatkan diri sengan baik, mampu membina hubungan dengan rekan kerja, mempunyai niat yang baik dan tangguh, mempunyai motivasi untuk menghadapi segala resiko dan tantangan yang ada, mampu menganalisis kebijakan dengan memberika saran analisis kebijakan dengan tepat, mampu bekerja berbasis kinerja, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mau menerima pekerjaan apapun.

Di *Malang Corruption Watch* (MCW), profil lulusan yang dibutuhkan sudah cukup sesuai, namun pada intinya ada beberapa hal yang perlu penekanan lebih untuk diterapkan seperti mampu memformulasikan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen sektor publik dan menguasai metode teknik analisis kualitatif dan kuantitatif untuk administrasi publik. Ada kesamaan pendapat dari beberapa pemberi kerja yang telah dijelaskan, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa LO S1 Administrasi Publik FIA UB telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh institusi mereka, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa lulusan Administrasi Publik FIA UB mampu bekerja secara baik dengan memberikan banyak kontribusi yang positif.

Untuk evaluasi kompetensi kerja lulusan dari S1 Administrasi Publik FIA UB ini di Balitbang sendiri, karena lulusan administrasi publiknya masih sangat terbatas sedangkan bidang penelitian administrasi publik hampir 50% karena penelitian di Balitbang sendiri bisa lintas sektoral sehingga para pegawainya memang dituntut untuk memperdalam ilmu administrasi walaupun awalnya *basic* ilmunya dari disiplin ilmu lain dan beberapa lulusan yang bekerja disini sudah mampu untuk melakukan penelitian mengenai administrasi publik itu sendiri.

Di BKD, untuk evaluasi alumni yang terdapat di BKD Provinsi Jawa Timur ini sudah bagus kinerjanya dan sesuai dengan kebutuhan di institusi ini dan untuk meningkatkan kinerja lulusannya bisa dengan

mempertahankan kualitas pembelajarannya. Di BPKAD sendiri, evaluasi kerja dilakukan sesuai dengan menggunakan kinerja berbasis anggaran sehingga evaluasi dinilai dari penyerapan anggaran yang dilihat dari kesesuaian serapan anggaran. Sehingga dibutuhkan lulusan yang kompeten dan mampu mengelola kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.

Di MCW, lulusan sudah sangat sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus bisa mereka terapkan di MCW ini seperti mengkaji administrasi dan kebijakan dan juga memahami bagaimana proses teknis pengambilan keputusan karena memang *basic* ilmu pemerintahan yang mereka dapatkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di MCW yang pada dasarnya memonitoring kegiatan pemerintah.

Kontribusi yang diberikan oleh lulusan Administrasi Publik di Balitbang, lulusan administrasi publik ketika bekerja di bagian kepegawaian bisa membuat rencana pajak rekrutmen pegawai, membuat budgeting penataan formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang di bidang penelitiannya sudah dapat membentuk penelitian, kaderisasi penelitian. Untuk lulusan di BKD salah satu pegawainya ini ada yang karena dia belajar ilmu administrasi publik berawal dari tugas belajar dan sebelum tugas belajar beliau di bagian keuangan sehingga administrasi publiknya tidak begitu digunakan, sedangkan untuk pegawai yang lain ini ada yang memang lulusan S1 ilmu administrasi dan penempatannya ada di analisis kepegawaian sehingga ilmu administrasi yang diperoleh sudah cukup pas dan beliau sangat pandai dalam hal memanfaatkan ilmunya seperti membuat surat kenaikan pangkat, menganalisis peraturan gubernur dan memberikan masukan Pergub serta penjabaran undang-undang.

Di BKD lulusan administrasi publik jika ditempatkan di keuangan diharapkan mampu untuk mengelola keuangan dalam hal kebijakan publiknya. Untuk yang di pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang baik yang tidak berbasis untuk mengambil keuntungan melainkan memberika pelayanan yang prima. Para mahasiswa FIA publik di MCW banyak berkontribusi, cukup banyak memberika masukan tentang dasar-dasar penelitian, masukan yang bagus mengenai metode penelitian dan terutama pandangan terkait teoritik pemerintahan yang memang mereka kuasai. Ada beberapa mahasiswa FIA yang menjadi tim penyunting buku mengenai MCW dan gerakan anti korupsi di Indonesia. Ada beberapa mahasiswa FIA juga yang mampu mengembangkan potensi dirinya selain hal-hal yang berhubungan dengan ilmu administrasi.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan perbaikan kualitas LO dan kelayakan kerja atau kompetensi lulusan administrasi kedepan menurut Balitbang adalah dengan adanya penambahan kuliah

dengan mengadakan pembelajaran melalui laboratorium, seperti BTP, LKP3, LPOMP, dan pusat-pusat kajian lainnya. Selain itu juga, selain kuliah di dalam kelas bisa dengan membuka forum-forum pertemuan dengan lulusan yang bisa dijadikan untuk membangun networking atau jaringan antara lulusan FIA dengan pemberi kerja atau *fresh graduate* dengan alumni FIA yang bekerja di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta. Sekaligus mahasiswa mampu menguasai anggaran keuangan sektor publik dan menguasai IT dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi sektor publik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BKD adalah LO yang sudah ada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik sudah sesuai dengan keadaan di lapangan kerja, dan perlu mempertahankan kualitas pembelajarannya sehingga mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau pelayanan publik yang terkait dengan administrasi publik. Dari BKD adalah karena kurangnya pengelanaan mengenai FIA itu sendiri sehingga kalah dengan fakultas disiplin ilmu lain, sehingga harapannya administrasi publik bisa menjadi ahli untuk kebutuhan publik dan pemerintahan. Sehingga diharapkan pemimpin-pemimpin itu berasal dari lulusan administrasi publik karena memang diadministrasi publik diajari beberapa hal seperti mengenai kebijakan, cara untuk memerintah dan memberikan pelayanan sehingga bukan hanya sekedar bisa memerintah tanpa tahu ilmunya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MCW adalah dengan penambahan muatan LO seperti LO yang berkaitan dengan kepekaan atas kondisi sosial masyarakat (empati sosial) dan juga memperbanyak kegiatan-kegiatan yang mengeksplorasi dampak kebijakan khususnya terhadap masyarakat marginal. Pada intinya, LO yang telah dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja dan perlu adanya penekanan-penekanan lebih lanjut di beberapa LO yang sudah tersedia. Ada juga penambahan seperti mahasiswa harus lebih menguasai teknologi informasi untuk menunjang kerjanya di sektor publik.

Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Publik berpendapat bahwa *learning outcome* yang saat ini diterapkan di Prodi Administrasi Publik FIA UB bukanlah hasil penyusunan internal Prodi Administrasi Publik FIA UB, melainkan hasil kesepakatan rapat IAPA (*Indonesian Association for Public Administration*) yang merupakan asosiasi dari para Pengelola Program Studi Administrasi Publik/ Negara, para akademisi Administrasi Publik/ Negara, dan para praktisi Administrasi Publik/ Negara diseluruh Indonesia, dalam rangka membangun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk lingkup studi Ilmu Administrasi Publik/ Negara. Hasil rapat tersebut

akhirnya menetapkan bahwa seluruh program studi Administrasi Publik/ Negara yang tergabung dalam asosiasi IAPA, wajib menerapkan 10 *Learning outcomes* tersebut.

Strategi untuk menyesuaikan LO dengan kebutuhan pemberi kerja adalah dengan LO diterapkan di Prodi Administrasi Publik/Negara secara given oleh asosiasi. Dan LO tersebut oleh prodi Administrasi Publik FIA UB dijabarkan dalam kurikulum yang terakhir kali disusun pada Tahun 2014 lalu.

Pada dasarnya rangkaian mata kuliah yang ada pada kurikulum, dipilih untuk mampu mewujudkan harapan tercapainya *Learning Outcomes (Expected Learning Outcomes)*, dilihat dari butir-butir pokok bahasan yang membangun mata kuliah tersebut, rumusan Tujuan Instruksional Umum, hingga rumusan Tujuan Instruksional Khusus. Kurikulum inilah yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja, selain yang utama didasarkan pada keberadaan LO Prodi Administrasi Publik/ Negara yang ditetapkan oleh IAPA dalam rangka membangun KKNi untuk Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Indonesia.

Dalam membuat kurikulum, program studi Administrasi Publik FIA UB telah mengundang perwakilan stakeholder eksternal, antara lain pengguna lulusan dan alumni, selain *stakeholder* internal seperti dosen, karyawan, dan mahasiswa. Masukan-masukan dari para stakeholder eksternal juga berusaha diakomodasi dalam rangka menyelaraskan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

Strategi dari Kaprodi untuk memastikan LO dicapai dengan baik oleh lulusan adalah setelah LO dijabarkan dengan kurikulum yang telah mendapat masukan dari berbagai *stakeholder*, masing-masing mata kuliah akan dimatangkan dengan melakukan penyusunan ulang silabus (RPKPS). Tidak hanya itu saja, upaya memastikan LO dicapai dengan baik oleh lulusan juga kami lakukan dengan menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, baik *Problem Based Learning (PBL)* maupun *Student Centred Learning (SCL)*, semacam *jigsaw learning*, *Snow-Ball Learning*, *Resume Group*, *Role Playing*, *Group Discussion*, *e-learning* dll. Berbagai macam strategi pembelajaran tersebut juga melakukan evaluasi terhadap kompetensi dari mahasiswa yang bersangkutan, selain ada juga metode evaluasi pada tengah semester maupun akhir semester. Selain mengasah *hardskill* dan *softskill* mahasiswa, berbagai strategi dan evaluasi pembelajaran ini diharapkan mampu memastikan pencapaian *Learning outcomes* yang menjadi muatan bagi masing-masing mata kuliah.

Menurut pengamatan penyelenggara Prodi, LO Administrasi Publik telah diimplementasikan dan dicapai dengan cukup baik. Terbukti respons dari pengguna lulusan yang puas akan kualifikasi lulusan dan

mereka telah menggunakan kompetensi lulusan Prodi Administrasi Publik dan para alumni yang sudah merasa mempunyai *skill* yang dibutuhkan ketika mereka terjun didunia kerja. Hal ini kami ketahui ketika proses *tracer study*, dan beberapa kali proses temu alumni.

Kesesuaian dan evaluasi *Learning Outcomes* Prodi Adiministrasi Publik dengan kompetensi rill lulusan menurut Kaprodi adalah dalam kadar prosentase yang cukup besar (perlu penelitian yang mendalam untuk lebih detailnya), kami yakin lulusan Prodi Administrasi Publik telah memiliki kompetensi yang benar-benar menguasai seluruh *Learning Outcomes* yang telah diset oleh Prodi Administrasi Publik. Beberapa lulusan juga telah diterima diberbagai intansi kerja baik pusat maupun daerah dalam berbagai posisi jabatan, bahkan ada yang telah menjadi orang besar seperti mantan Walikota Blitar, Djarot Saiful Hidayat, yang saat ini menjabat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, dan Mochammad Jasin, mantan ketua KPK dan saat ini menjabat sebagai salah satu deputi Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa LO Administrasi Publik publik telah membuat lulusan Administrasi Publik memiliki kompetensi yang dibutuhkan didunia kerja dan bahkan mampu membawa mereka berprestasi.

Strategi lain dari Prodi Administrasi Publik dalam meningkatkan kelayakan kerja lulusan adalah dengan memperkuat *softskill*, *team work*, *public speaking*, *leadership*, dan jiwa *entrepreneur*, melalui berbagai kegiatan baik itu intrakurikuler melalui strategi pembelajaran di masing-masing mata kuliah, ekstrakurikuler melalui berbagai macam kegiatan fakultas, jurusan, himpunan mahasiswa, Lembaga Otonomi Fakultas.

Tantangan yang dihadapi oleh lulusan Prodi Administrasi Publik di dunia kerja menurut Kaprodi sangat besar. Terlebih diharapkan dengan halangan adanya moratorium PNS, yang mana semua jalur rekrutmen pegawai pemerintah masih ditutup dalam beberapa tahun. Padahal, profil lulusan administrasi publik harusnya mayoritas menysasar ke bidang pemerintahan. Hal ini yang menjadi kendala masih banyaknya lulusan yang belum mendapat kesempatan bekerja di bidang pemerintahan. Kendala tersebut suatu saat juga akan memberikan pengaruh, setelah lama ditutup kemudian apabila akan dibuka peluang seleksi di bidang pemerintahan, akan membuat persaingan yang jauh lebih ketat.

Saran yang diberikan terkait dengan peningkatan kelayakan kerja lulusan S1 Administrasi Publik adalah Proses perbaikan akan selalu kami (selaku pengelola prodi) lakukan, segala masukan yang berarti bagi pengembangan kualitas Prodi Administrasi Publik, termasuk kualitas lulusan, akan kami terima dan kami tindak lanjuti. Selain dari pada itu, selama proses pendidikan dari awal hingga akhir dilalui oleh masing-

masing mahasiswa dengan baik, tertib dan disiplin, kami yakin lulusan kami mempunyai kelayakan kerja lulusan yang cukup baik. Jadi perlu penekanan konsistensi dari mahasiswanya. Faktor lain yang perlu juga menjadi pertimbangan adalah update pengetahuan yang perlu ditingkatkan. Selama ini, menumbuhkan budaya akademis di kalangan dosen dan mahasiswa masih sangat sulit sekali untuk memasukkan aspek pembaharuan. Tentu saja harus diimbangi dengan fasilitas yang memang harus kami sediakan, antara lain: keterbaruan sumber pustaka, jurnal, dll. Itu masih terus akan kami upayakan.

Kenyataan di lapangan, masih sedikitnya lulusan dari Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA UB yang bekerja di sektor pemerintahan, hal ini ada kendala seperti yang disampaikan oleh Kaprodi seperti moratorium PNS yang mana semua jalur rekrutmen pegawai pemerintah masih ditutup dalam beberapa tahun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lulusan Prodi Administrasi Publik FIA UB yang bekerja di pemerintahan sudah tepat jabatan dan fungsinya sesuai dengan LO yang diterapkan d Prodi Administrasi Publik, karena memang harapan dari LO ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pemberi kerja.

Dibeberapa instansi atau lembaga, LO S1 administrasi publik ini memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan mampu untuk memberikan kontribusi yang cukup banyak sesuai dengan implementasi LO yang ada. Dan LO yang diterapkan sudah cukup bagus dan sesuai dengan kebutuhan dilapangan pekerjaan namun ada beberapa hal yang perlu untuk ditekankan kembali. Evaluasi di lapangan menjelaskan bahwa lulusan S1 Administrasi Publik sudah sesuai dengan bidang pekerjaan yang sekarang dengan ilmu yang didapatkan sehingga lulusan Prodi Administrasi Publik memiliki kompetensi yang benar-benar menguasai seluruh *Learning Outcome* yang telah di atur oleh Prodi Administrasi Publik. Lulusan Prodi Administrasi Publik mempunyai banyak kontribusi yang sesuai dengan bidangnya, sehingga LO yang diatur untuk memberikan bekal *skill* yang dibutuhkan oleh pemberi kerja sudah terpenuhi. Namun, ada beberapa lulusan yang memiliki nilai plus ketika dia lebih aktif diorganisasi sehingga dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak. Hal ini sesuai dengan strategi Kaprodi untuk memperkuat *softskill* lulusan melalui kegiatan baik intrakurikuler melalui strategi pembelajaran mapun kegiatan ekstrakurikuler.

Pada intinya, LO yang telah diterapkan sudah bagus dan sesuai dengan kebutuhan, hal ini juga karena ketika kurikulum yang disusun juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun ada beberapa poin yang memang memerlukan penekanan mengenai beberapa hal. Selain itu juga, ada poin tambahan seperti lulusan

diharapkan mampu menguasai TI untuk mendukung kinerja pegawai di sektor publik.

Sebagai lulusan S1 Ilmu Administrasi Publik yang bekerja di instansi pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat pada umumnya mempunyai kemampuan pada jenjang 6, dimana sesuai dengan teori deskripsi jenjang kualifikasi KKNi yang menyebutkan bahwa mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan spesialis dan mendalam di bidang-bidang tertentu, hal ini di buktikan dengan bahwa para lulusan memiliki kemampuan bekerja yang sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Namun, ada beberapa kualifikasi poin yang ada di teori tidak semuanya di penuhi oleh para lulusan, karena memang keahlian yang dimiliki setiap individu berbeda dengan individu yang lain tergantung individu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sesuai dengan data yang di peroleh di lapangan menunjukkan bahwa lulusan S1 Administrasi Publik FIA UB yang bekerja di instansi pemerintah atau lembaga sosial sudah memenuhi standar kompetensi lulusan S1 Administrasi Publik di Indonesia yang memiliki empat kompetensi umum. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan bidang yang mereka dapatkan di perkuliahan seperti penguasaan konsep teoritis di bidang analisis kebijakan, bidang pemerintahan, bidang analisis kepegawaian dan bidang-bidang tertentu di ilmu administrasi publik.

Sesuai dengan teori *Graduate Employability* yang mempunyai pengertian bahwa kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bekerja juga penetapan jati diri seseorang untuk berkontribusi dalam suatu bidang dan ditunjukkan dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini jika dikaitkan dengan data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa, lulusan S1 administrasi publik sudah mulai mampu menunjukkan kemampuan yang mereka miliki dengan menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan bekal ilmu administrasi publik yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kontribusi positif yang para lulusan berikan di tempat dia bekerja.

4.2 *Kesesuaian Learning Outcomes (LO) FIA UB dengan Kompetensi Riil Lulusan*

Secara umum lulusan Prodi Administrasi Publik telah memiliki kompetensi dan dinilai juga menguasai *Learning Outcomes* yang telah ditentukan oleh Prodi Administrasi Publik. Beberapa lulusan juga telah diterima di berbagai instansi, baik pusat maupun daerah dalam berbagai posisi jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa LO Administrasi Publik telah membuat lulusan Administrasi Publik memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja dan bahkan mampu membawa mereka berprestasi.

Namun demikian, tantangan besar juga dihadapi oleh lulusan administrasi publik dengan adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil, yang mana semua jalur rekrutmen pegawai pemerintah masih ditutup dalam beberapa tahun. Padahal, profil lulusan administrasi publik harusnya mayoritas menasar ke bidang pemerintahan. Hal ini yang menjadi kendala masih banyaknya lulusan yang belum mendapat kesempatan bekerja di bidang pemerintahan. Kendala tersebut suatu saat juga akan memberikan pengaruh, setelah lama ditutup kemudian apabila akan dibuka peluang seleksi di bidang pemerintahan, akan membuat kompetisi yang jauh lebih ketat.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan peningkatan kelayakan kerja lulusan S1 Administrasi Publik ke depan, yaitu adanya proses perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Segala masukan yang berarti bagi pengembangan kualitas Prodi Administrasi Publik, termasuk kualitas lulusan perlu diperhatikan. Disamping itu, selama proses pendidikan dari awal hingga akhir dilalui oleh masing-masing mahasiswa dengan baik, tertib dan disiplin, maka lulusan mempunyai kelayakan kerja lulusan yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Sedarmayanti (2004), bahwa kompetensi adalah:

- a) Konsep luas, memuat kemampuan mentransfer keahlian dan kemampuan kepada situasi baru dalam wilayah kerja, menyangkut organisasi dan perencanaan pekerjaan, inovasi dan mengatasi aktivitas rutin, kualitas efektivitas personal yang dibutuhkan di tempat berkaitan dengan rekan kerja, manajer serta pelanggan;
- b) Kemampuan untuk melakukan tugas;
- c) Dimensi perilaku yang mempengaruhi kinerja;
- d) Karakteristik individu apapun yang dapat dihitung dan diukur secara konsisten, dapat dibuktikan untuk membedakan secara signifikan antara kinerja yang efektif dengan kinerja yang tidak efektif;
- e) Kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik; dan
- f) Bakat, sifat dan keahlian individu apapun yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif dan baik sekali.

Berdasarkan uraian tersebut, ia menyimpulkan secara menyeluruh bahwa “kompetensi merupakan faktor mendasar yang perlu dimiliki seseorang sehingga mempunyai kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja.”

Selanjutnya, Sedarmayanti (2004:181) menyatakan bahwa kompetensi mempunyai cakupan yang komprehensif, terdiri atas:

- a) Motif (*motive*), yaitu kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara berpikir dan bersikap;

- b) Sifat-sifat dasar (*trait*), yaitu yang menentukan cara seseorang bertindak/bertingkah laku;
- c) Citra pribadi (*Self image*), yaitu pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri atau *inner-self*;
- d) Peran kemasyarakatan (*social role*), yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya dalam interaksinya dengan orang lain atau *outer-self*;
- e) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam tugas/ pekerjaan tertentu; dan
- f) Keterampilan (*skills*), yaitu kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kompetensi memiliki cakupan yang kompleks. Pada awalnya kompetensi adalah kemampuan atau karakteristik dasar yang dimiliki seseorang, tetapi dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Adapun jenis kompetensi itu sendiri ada tiga jenis, yaitu:

- a) Kompetensi individual;
- b) Kompetensi pekerjaan atau teknis; dan
- c) Kompetensi organisasi.

Pendidikan (dan pelatihan) berbasis kompetensi merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan SDM yang berfokus pada hasil akhir (*outcome*). Pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu proses yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah:

- a) Menghasilkan kompetensi dalam menggunakan keterampilan yang ditentukan untuk pencapaian standar pada suatu kondisi yang telah ditetapkan dalam berbagai pekerjaan dan jabatan; dan
- b) Penelusuran (penilaian) kompetensi yang telah dicapai dan disertifikasi.

Dalam pada itu, terdapat sembilan prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya:

- a) Bermakna, praktik terbaik;
- b) Hasil pembelajaran;
- c) Fleksibel;
- d) Mengakui pengalaman belajar sebelumnya;
- e) Tidak didasarkan atas waktu;
- f) Penilaian yang disesuaikan;
- g) Monitoring dan evaluasi;
- h) Konsistensi secara nasional; dan
- i) Akreditasi pembelajaran.

Selanjutnya, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dapat diselaraskan dengan KKNI dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Tahap Pertama, Menyusun Capaian Pembelajaran Universitas (*University Learning Outcomes*). Diturunkan dari visi dan misi universitas yang mengandung profil umum lulusan sebagai *competitive and comparative advantage*

dari universitas tersebut. Capaian pembelajaran universitas lebih menampilkan *soft skill* dibandingkan *hard skill* yang harus dimiliki lulusan universitas tersebut.

Tahap Kedua, Merumuskan profil lulusan program studi. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi dimasyarakat/ dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan: lulusan seperti apa yang akan dihasilkan oleh program studi setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya. Profil ini dapat mengacu pada profesi tertentu misal dokter, pengacara, apoteker, dan lainnya, tetapi juga dapat mencerminkan sebuah peran tertentu seperti manajer, pendidik, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja seperti komunikator, kreator, pemimpin, dan sebagainya.

Rumusan profil disarankan menuliskan peran profesional dan serangkaian kompetensi (*learning outcomes*) yang harus dimiliki lulusan untuk menjalankan peran tersebut secara profesional, akuntabel, dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan (PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat (4)). Profil lulusan mengacu pada capaian pembelajaran universitas, agar terbentuk kesinambungan proses untuk mencapai visi dan misi universitas. Namun kekhasan lulusan program studi menjadi bagian penting untuk menunjukkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari setiap program studi.

Tahap Ketiga, Perumusan Standar Kompetensi Lulusan. Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai *outcome* pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya.

Tahap Keempat, Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (*Program Learning Outcomes /PLO*). PLO merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus program studi tertentu di perguruan tinggi. Capaian pembelajaran program studi dirumuskan berdasarkan hasil studi pelacakan (*tracer study*) dan analisis kebutuhan dunia kerja yang terkait dengan kompetensi yang dibangun, serta jenjang kualifikasi yang diacu dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Tahap Kelima, Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (*Course Learning Outcomes/ CLO*). CLO dengan jelas menggambarkan apa yang akan mahasiswa ketahui dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di

akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran perkuliahan berbasis kinerja (performance) dan berorientasi pada hasil. CLO merupakan gambaran yang bermakna (significant) dan terkait dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan mahasiswa di 'dunia nyata'-pembelajaran yang 'benar-benar penting dalam jangka panjang'. CLO mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan-manakala mereka mengintegrasikan pembelajaran dari seluruh perkuliahan diperolehnya. Setiap CLO harus sejalan dengan satu atau lebih capaian pembelajaran program studi.

Tahap Keenam, Menemukanali Konsep Kunci dan Kata Kunci pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Pernyataan konsep kunci (*key concept*) tidak dimaksudkan hanya untuk *concept knowledge* pada ranah pengetahuan Bloom, tetapi lebih ditekankan pada *content knowledge* dari setiap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Konsep-konsep kunci sesungguhnya merupakan daftar dari konsep inti pada perumusan bidang kajian yang dimiliki program studi. Konsep-konsep inti ini pula yang dapat dijadikan patokan dalam menghitung beban kerja mahasiswa (*student work load*) yang menjadi dasar perhitungan jumlah kredit untuk setiap mata kuliah. Karena dalam setiap konsep kunci yang di dalamnya terdapat kata-kata kunci (*key word*) dapat diduga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penguasaan konsep tersebut (*time expectation*).

Tahap Ketujuh, Pengembangan RPKPS (Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester) Mengadaptasi pendapat Clark dan Lampert dalam Sedarmayanti (2004) dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah determinan utama dari apa yang diajarkan. Kurikulum yang dipublikasikan, ditransformasikan, dan diadaptasikan dalam proses perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran termasuk di dalamnya mengalokasikan waktu pembelajaran untuk individu-individu dan kelompok-kelompok mahasiswa; mengorganisasikan jadwal diluar kelas.

4.3 Kesesuaian Kompetensi Riil Lulusan dengan Kompetensi yang Dibutuhkan Pemberi Kerja

Secara umum kompetensi riil lulusan program studi S1 Administrasi Publik sesuai analisa di atas sudah mencerminkan pencapaian *Learning Outcomes* yang cukup baik. Sedangkan analisa kesesuaian *Learning Outcomes* Program Studi S1 Administrasi Publik terhadap kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, pada umumnya juga telah disesuaikan dengan baik. Jadi, *learning outcomes* dari program studi tersebut sudah dapat dipastikan telah linear, baik itu dengan kompetensi riil lulusan, maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja (*pemberi kerja*).

Dari uraian diatas, bisa ditarik sintesa bahwa kompetensi riil lulusan Prodi S1 Administrasi Publik

telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak pemberi kerja. Meskipun pada umumnya, karena perubahan lingkungan yang cukup dinamis, maka kesesuaian ini perlu diupayakan terus. Hal ini bisa dilakukan dengan cara adanya komitmen dari kedua program studi untuk terus memacu keterbaruan sistem dan kurikulum yang ada di lingkungan internalnya, untuk selalu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi kompetensi pemberi kerja di level manapun, baik lokal, nasional, maupun Internasional.

5. Kesimpulan

Dari penelitian *Graduate Employability* Pada Lulusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun 2015, disimpulkan bahwa:

- Learning Outcome* FIA sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Prodi Administrasi Publik sudah sesuai *Learning Outcome*-nya dengan kebutuhan pemberi kerja dalam bidang pemerintahan dan jenjang karir yang sesuai dengan jalurnya. Serta lulusan Administrasi Publik juga mampu mengerjakan amanah yang telah diberikan. Salah satu kendala yang dihadapi untuk lulusan administrasi publik saat ini adalah adanya moratorium Pegawai Negeri Sipil;
- Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) program studi selain bersandar pada hasil *tracer study*, *market signal* dan *need analysis* dari *stakeholder*, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang (level) yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dimaksudkan agar ada kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara kompetensi dengan kualifikasi; dan
- Kompetensi riil lulusan Prodi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak pemberi kerja.

Daftar Pustaka

- Cleary, Mitch, et. al. (2007) *Graduate Employability Skills: Prepared for the Business, Industry and Higher Education Collaboration Council*. Melbourne, Precision Consultancy.
- Hannah, Steven. (2005). *Sorting Out Card Sorting. Laporan Penelitian untuk University of Oregon, Portland*.
- Kinash, Shelley, et al. (2015). "Global graduate employability research: A report to the Business20 Human Capital Taskforce (DRAFT)." *Learning and Teaching papers*. Paper 103

[Internet]. Diakses melalui:
<[http://epublications.bond.edu.
au/tls/103](http://epublications.bond.edu.au/tls/103)>
[Diakses pada 2 November 2015].

Kulkarni, Nitin., dan A.H. Chachadi. (2014) Skills for Employability: Employers' Perspective. *SCMS Journal Management*. July-September 2014, pp. 64-70.

Oxford University (t.t.) *Oxford Dictionaries – Dictionary, Thesaurus, & Grammar* [internet]. Oxfordshire, Oxford University Press. Tersedia melalui: <[https://en.oxforddictionaries.com/
definition/employable](https://en.oxforddictionaries.com/definition/employable)> [diakses pada 2 November 2015].

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sedarmayanti (2009) *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*. Bandung, CV. Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

World Bank 1994 *Higher Education: Lessons of Experience*. Washington, IBRD/ World Bank.